



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 148/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **empat belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:58** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Material Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Muhammad Subhan Karantu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H., dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **08:21** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 148/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Muhammad Subhan Karantu
Pokok Permohonan : Pengujian Material Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
No APPP : 148/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Surat Kuasa	1	
7	Permohonan bertanggal 14 Oktober 2024	1 rangkap	Asli
8	Surat Kuasa bertanggal 11 Oktober 2024	1 rangkap	Asli
9	KTA dan BAS a.n. Muhammad Qabul Nusantara	1 rangkap	Copy
10	KTP, KTA, dan BAS a.n. Febriansyah Ramadhan	1 rangkap	Copy
11	KTA dan BAS a.n. Sunarto Efendi	1 rangkap	Copy
12	KTP dan KTA Magang a.n. Bayu Yusya	1 rangkap	Copy
13	Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-4	1 rangkap	Asli
14	Alat Bukti P-1 s.d. P-4	1 rangkap	Asli leges
15	Softcopy	7 Files	PDF dan Word (dikirim via E-mail)

Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.